

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada kerangka makro hakekatnya mempunyai keterkaitan dengan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah. Pengalaman pembangunan di beberapa daerah selama ini menunjukkan adanya perkembangan yang asimetrik antara pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan sektor ekonomi yang cenderung mengarah pada egosektoral, sehingga tidak sesuai dengan pengembangan perekonomian wilayah. Sedangkan dilain pihak perencanaan pembangunan daerah/wilayah seringkali tidak sesuai dengan kepentingan makroekonomi dalam arti luas. Sejalan dengan pemikiran tersebut diatas maka pembangunan ekonomi Indonesia umumnya, harus dikaji keterkaitan dan ketergantungan terhadap sektor ekonomi baik dari dimensi waktu maupun dimensi wilayah.

Saat ini transformasi ekonomi kita masih terus berlangsung dengan cepat, dimana kita telah berada dalam kelompok negara yang berpendapatan menengah dan sekarang dengan keadaan krisis ekonomi yang berkepanjangan maka kita cenderung berada pada kelompok yang berada pada tingkat pendapatan perkapita yang sangat rendah.. PDB negara kita meningkat sekitar 6 sampai 8 persen pertahun selama periode 1990an. Pada awal Pemerintahan orde baru tiga puluh tahun yang lalu pendapatan negara kita tidak lebih dari US\$ 75.00, akan tetapi ketika sebelum krisis ekonomi kita telah berada pada posisi pendapatan perkapita sekitar



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor
MB-IPB

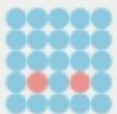
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



kurang lebih US\$ 1.200.00. Keberhasilan ini sudah tentunya tidak terlepas dari kontribusi sektor agribisnis khususnya pertanian primer dan sektor ekonomi makro terkait lainnya yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional. (Bungaran Saragih)

Pada kebanyakan negara berkembang, termasuk Indonesia harus tetap mensiasati berbagai perubahan lingkungan ekonomi dan bisnis lintas negara yang cenderung tanpa batas (globalisasi) yang terjadi dewasa ini agar mampu melihat dan membuat pilihan yang tepat dan bersifat *conditional* untuk mengantisipasinya. Oleh sebab itu perubahan struktur perekonomian sebagai kelanjutan (*follow-up*) dari kegiatan pembangunan pada masing masing sektor ekonomi membutuhkan kondisi kondisi tertentu dari sektor terkait dalam menunjang keberhasilan pelaksanaannya. Kondisi tersebut dapat ditinjau dari segi keterkaitan sektoral , potensi dan skruktur perekonomian wilayah (*site specific*), dan kebijakan pemerintah dalam bentuk kelembagaan dan pemberdayaan (otonomi daerah). Disektor agribisnis sendiri cukup banyak faktor yang perlu dan harus dipertimbangkan, sehubungan dengan adanya berbagai paradoks yang selalu melekat dalam proses transformasi perekonomian.

Pada PJP II, secara nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen per tahun, sektor agribisnis (pertanian primer) diharapkan tumbuh dengan percepatan minimal 3,6 persen per tahun, suatu tingkat pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai selama Pelita VI (3,4 persen per tahun)





Perubahan dalam struktur ekonomi memberikan implikasi kepada perubahan dalam struktur tenaga kerja menurut lapangan usaha atau sektor. Dalam tahun 1995 pada tingkat nasional sekitar 43,3 persen dari total angkatan kerja yang bekerja berada pada sektor pertanian, sedangkan sektor industri hanya menyerap 12,6 persen dari total angkatan kerja yang bekerja. Sementara itu pada tingkat wilayah, ternyata pada tahun yang sama jumlah yang bekerja pada sektor pertanian di Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencapai hampir 57,3 persen (Rivai Umar, 1998). Selanjutnya apabila dibandingkan antara struktur tenaga kerja menurut lapangan usaha dengan sektor pertanian, berarti rasio antara struktur tenaga kerja terhadap struktur ekonomi, maka akan diperoleh gambaran mengenai produktivitas relatif tenaga kerja di sektor tersebut. Dengan kenyataan masih tingginya tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian serta rendahnya hasil pertanian (*on farm agribusiness*), dapat mengindikasikan bahwa produktivitas sektor ini masih rendah, yang memberikan implikasi kepada tingkat pendapatan para pekerja di sektor ini.

Sektor agribisnis memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data tahun 1997 sekitar 70 persen dari PDB Indonesia disumbang oleh sektor agribisnis. Sebagai penghasil devisa sektor agribisnis secara konsisten mampu menyumbang net ekspor yang cukup besar dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1997 net ekspor dari sektor agribisnis telah mencapai US\$13 milyar. (Bungaran Saragih).

Keberhasilan yang telah dicapai masa lalu antara lain disebabkan oleh strategi pembangunan yang tepat, dan dibarengi dengan tujuan pembangunan yang

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor
MB-IPB



mencakup (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui peningkatan produktivitas pada berbagai sektor (terutama pertanian) dan (2) terjadinya perubahan struktur dari sektor pertanian ke sektor industri serta pengurangan jumlah orang miskin, baik dalam persentase maupun dalam jumlah nilai absolutnya telah dapat dicapai dan menunjukkan hasil yang mengembirakan.

Kegiatan pembangunan pada masa lalu itu walaupun cukup mengembirakan sebelum dilanda krisis yang berkepanjangan ini, masih memerlukan perhatian untuk masa yang akan datang terhadap berbagai tantangan berupa penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan serta pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan berupa pemberdayaan daerah dalam rangka otonomi.

Menghadapi tantangan tersebut agribisnis yang telah diuji pada masa lalu itu tetap diharapkan perannya kembali pada era reformasi ini yang masih terus dilanda krisis multidimensional. Agribisnis yang didalamnya terdapat subsistem pengolahan yang disebut agroindustri, memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi karena dapat mempercepat transformasi struktur perekonomian dari pertanian ke industri. Agribisnis diharapkan dapat menjadi wahana bagi usaha mengatasi kemiskinan dan memperluas serta penyerapan tenaga kerja karena daya jangkau serta spektrumnya yang luas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah agribisnis dapat diselaraskan dan diserasikan dalam pembangunan nasional dan regional/daerah yang berkelanjutan.





Dewasa ini kita diperhadapkan dengan isu ketimpangan antar daerah yang semakin mendapat perhatian, karena sampai sekarang pembangunan antar wilayah/daerah dan antar sektor yang tidak mengalami laju pertumbuhan yang sama. Hal ini dapat dicermati dari alokasi biaya pembangunan yang tidak merata disamping orientasi pembangunan pada kawasan tertentu sehingga terjadi disparitas dan gap yang luar biasa, misalnya antara Jawa dan luar Jawa serta antara kawasan barat dan kawasan timur wilayah Indonesia.

Sejalan dengan dinamika perubahan dan reorientasi pembangunan nasional yang mengarah pada pemberdayaan daerah, serta untuk mencapai tujuan dalam menghadapi tantangan terhadap masalah disparitas antar daerah tersebut di atas maka kegiatan pembangunan harus didekati secara regional dan secara sektoral..

Perencanaan pembangunan regional/daerah dimaksudkan agar semua daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Manfaat pembangunan regional adalah adanya pemerataan pembangunan atau perluasan dari pusat ke daerah (*spread effect*). Bila perencanaan pembangunan regional berhasil dan berkembang dengan baik, maka diharapkan kemandirian daerah dapat tumbuh dan berkembang sendiri (mandiri) atas dasar kekuatan sendiri.. Dengan demikian maka kenaikan pendapatan dan kesejahteraan di daerah tersebut tidak selalu tergantung pada pusat tetapi relatif cukup didorong (*generate*) dari daerah yang bersangkutan

Mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka diperlukan penentuan sektor sektor unggulan dan sektor kunci suatu wilayah.





Sektor sektor kunci atau sektor unggulan (*leading sector*) diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pusat pusat pertumbuhan baru di suatu wilayah. Dengan adanya sektor kunci maka dapat mendorong pemupukan modal dan investasi secara efisien dan efektif yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja serta kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Kabupaten Maluku Utara yang telah dimekarkan menjadi Propinsi Maluku Utara sebagai bagian integral dari negara Indonesia yang menyelenggarakan pembangunan wilayah/daerah diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan serta dinamika pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu maka peranan dan kontribusi sektor sektor kunci (*a leading sector*) sangat diharapkan, dan salah satu sektor unggulan tersebut adalah sektor agribisnis yang diharapkan sebagai sektor unggulan atau sektor yang memimpin yang sekaligus dapat memberikan kontribusi pendapatan wilayah/derah dan penyerapan tenaga kerja.

B. Perumusan Masalah

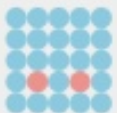
Kabupaten Maluku Utara dengan luas 103.789 Km² yang terdiri dari luas daratan 22.698 Km² dan lautan 81.091 Km² tersebar pada 320 pulau besar, sedang dan kecil memiliki potensi alam yang cukup besar dan belum sepenuhnya diberdayakan dalam rangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kegiatan kegiatan agribisnis (*resource base*).





Dalam pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Maluku Utara antara kurun waktu tahun 1993 sampai dengan tahun 1997, pangsa sektor pertanian terus mengalami penurunan, mulai dari 31,69 persen pada tahun 1993 turun menjadi 26,35 persen pada tahun 1997. Hal tersebut berbeda dengan dengan perubahan yang terjadi pada sektor industri pengolahan yang semakin mantap peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Maluku Utara. Pada tahun 1993, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 32,47 persen dan pada tahun 1997 kontribusi sektor tersebut sudah mencapai 32,57 persen (Kantor Statistik Kabupaten Maluku Utara). Menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Maluku Utara merupakan dampak dari kebijakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan serta adanya transformasi struktural dalam upaya mengembangkan, menyeimbangkan dan menjembatani pertumbuhan sektor industri dan pertanian. Dalam hal ini pengembangan sektor industri pengolahan (agroindustri) dengan tetap bertumpu pada kegiatan industri di bidang pertanian yang menjadi pilihan yang sangat penting dan strategis.

Proses transformasi struktur ekonomi di Kabupaten Maluku Utara ditandai pula dengan pergeseran kesempatan kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan sektor jasa serta pengalihan fungsi lahan dari sektor pertanian ke non pertanian. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pangsa penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dari tahun 1993 sampai tahun 1997 mengalami penurunan pula.



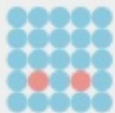


Prosentase penduduk yang bekerja pada sector pertanian tahun 1993 sebesar 70 % turun menjadi 67, 45 % pada tahun 1997.

Dari keseluruhan sektor dalam perekonomian Kabupaten Maluku Utara, walaupun kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan, akan tetapi potensi yang dimiliki sektor ini masih sangat besar. Sektor pertanian memberikan kontribusi bagi sektor industri (agroindustri) dan diharapkan akan berkembang dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, dengan pengertian apabila keduanya diintegrasikan secara kuat, dimana sektor industri pengolahan menggunakan bahan baku yang dihasilkan dari sektor pertanian setempat. Hal ini akan menyebabkan bahwa pengembangan sektor industri akan meningkatkan pasar bagi produk-produk pertanian dalam wilayah yang bersangkutan.

Dengan mengacu pada latar belakang di atas maka, secara sistematis masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan sektor agribisnis terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Utara dan keterkaitan sektor pertanian dengan sektor sektor ekonomi lainnya.
2. Sektor sektor perekonomian apa saja yang menentukan (*leading sector*) dan diunggulkan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maluku Utara.
3. Bagaimana kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Utara yang telah dan akan serta dapat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah setempat.





C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini ditinjau dari pendekatan makro bertujuan untuk

1. Mengkaji dan menelaah kontribusi sektor agribisnis terhadap pertumbuhan daerah/wilayah Kabupaten Maluku Utara
2. Mengkaji hubungan (keterkaitan) sektor agribisnis dengan sektor sektor perekonomian lainnya dalam kerangka pembangunan daerah
3. Menelaah sektor sektor kunci yang menentukan dan diunggulkan dalam pertumbuhan ekonomi daerah/wilayah Kabupaten Maluku Utara.
4. Memberikan alternatif dan solusi kebijakan serta strategi dalam rangka pembangunan daerah.

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan akan memberikan manfaat :

1. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka merumuskan strategi pembangunan wilayah/daerah khususnya pengembangan sektor agribisnis.
2. Sebagai bahan dan landasan analisis bagi penentu kebijakan lainnya untuk menggali dan mencari sumber sumber pertumbuhan ekonomi baru terutama sektor agribisnis sebagai sektor andalan daerah (*site specific*) untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatpetani
3. Diperolehnya konsep pola hubungan sektoral antar subsektor dan sektor agribisnis dengan sektor lainnya dalam pembangunan daerah





4. Sebagai data dasar (*benchmark data*) bagi peneliti dalam bidang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

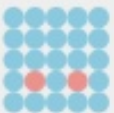
D. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini dibatasi pada bagaimana peranan dan kontribusi sektor agribisnis dalam konteks ini adalah pada kegiatan produksi pertanian secara keseluruhan (usaha tani) atau sektor pertanian primer dalam wilayah Kabupaten Maluku Utara dengan berdasarkan pada indikator pendapatan wilayah dan penyerapan tenaga kerja.

Wilayah atau daerah penelitian adalah Wilayah administratif dan hukum Kabupaten Maluku Utara dengan wilayah yang dibawahinya.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.